

LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN TA 2010

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI SEKTOR PERTANIAN DI TINGKAT RUMAHTANGGA  
DAN WILAYAH PERDESAAN**

**Oleh :**

Benny Rachman  
I Wayan Rusastra  
Sunarsih  
Bambang Prasetyo  
Valeriana Darwis  
Herlina Tarigan  
Andi Askin  
M. Husein Sawit  
Edi Basuno  
Erna Maria Lokollo



**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2010**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### Latar Belakang

Pencapaian sasaran MDG di Indonesia akan dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks. Di tingkat internasional terdapat permasalahan globalisasi dan komitmen negara maju, krisis energi dan pangan global. Pada tataran domestik permasalahannya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pembangunan, peningkatan kapasitas produksi pertanian, peningkatan kapasitas dan akses ekonomi bagi penduduk miskin. Permasalahan domestik lainnya adalah urgensi pemantapan pendekatan, kebijakan strategis, dan program pengentasan kemiskinan. Permasalahan umum domestik dan internasional tersebut bermuara pada perlambatan dalam pencapaian sasaran pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang diikuti oleh disparitas pendapatan yang semakin besar antar wilayah, desa-kota, dan antar kelompok pendapatan.

Alokasi dana program pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbagai kementerian terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Bahkan pada momen tertentu (antisipasi pengurangan dampak subsidi BBM) dilakukan peningkatan alokasi dana secara signifikan. Namun demikian, penurunan populasi penduduk miskin masih relatif kecil, dan bahkan cenderung mengalami perlambatan. Permasalahan pokok antara lain mencakup paradigma/prinsip dasar, pendekatan/perumusan program, koordinasi pelaksanaan, kelembagaan struktural dan operasional implementasi program.

Permasalahan pokok tersebut erat kaitannya dengan formulasi perencanaan dan efektivitas implementasi program di lapangan, diantaranya adalah : (a) pendekatan parsial sektoral, tidak terkoordinasi, efektivitas lemah, sehingga tidak berkelanjutan; (b) peningkatan kapasitas penduduk miskin tidak diikuti dengan perluasan akses terhadap kesempatan kerja; (c) peningkatan kapasitas penduduk miskin tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi perdesaan dan integrasi ekonomi desa kota; (d) program pengentasan kemiskinan lebih memprioritaskan pada peningkatan pendapatan dan kurang dikaitkan dengan peningkatan kapasitas secara inklusif yang mencakup perbaikan pendidikan dan kesehatan; dan (e) tidak adanya sinergi program pemberdayaan dengan program JPS, dan juga sinergi antar program JPS (BLT, Raskin, JPS kesehatan, JPS pendidikan).

Koordinasi dan sinergi program lintas sektoral pengentasan kemiskinan akan memperbaiki efektivitas pemanfaatan dana pembangunan dan kinerja program pengentasan kemiskinan. Dampak antara (*intermediate impact*) tersebut secara simultan akan mampu menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan dimungkinkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengevaluasi konsepsi/perencanaan program pemberdayaan sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan; (2) Mengevaluasi dampak program pemberdayaan sektor pertanian terhadap peningkatan ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan di perdesaan; (3) Menganalisis keterkaitan/sinergi program pemberdayaan dan Jaring Pengaman Sosial dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan; (4) Merumuskan kebijakan strategis, dan program pengentasan kemiskinan dalam perspektif percepatan transformasi struktural ekonomi pertanian dan perdesaan.

### Keluaran Penelitian

Keluaran penelitian adalah: (1) Data dan informasi berupa kompilasi dan deskripsi program pemberdayaan sektor pertanian dalam perspektif pengentasan kemiskinan di perdesaan; (2) Data dan informasi berupa deskripsi dampak ekonomi, sosial dan kelembagaan program terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan; (3) Data dan informasi tentang keterkaitan/sinergi program pemberdayaan sektor pertanian dalam konteks pengentasan kemiskinan; (4) Rumusan alternatif kebijakan strategis dan program pengentasan kemiskinan dalam perspektif percepatan transformasi struktural ekonomi pertanian dan perdesaan.

### Metodologi

Evaluasi dampak dilakukan untuk menilai manfaat (dampak positif) maupun kerugian (dampak negatif) yang tercipta dengan adanya program ini. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan berhasil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi

ini dilakukan pada saat program melalui kegiatan-kegiatannya telah selesai dilaksanakan (*ex-post evaluation*).

Evaluasi dampak dilakukan untuk mengetahui mencapai tujuannya. Indikator tujuan yang dijadikan acuan keberhasilan adalah produksi, pendapatan, kesempatan kerja, pengembangan usaha mikro, kesejahteraan yang lebih luas, dan pola pikir/mindset masyarakat yang bermuara kepada kemandirian rumah tangga petani dan masyarakat perdesaan. Indikator keberhasilan bersifat spesifik menurut tujuan program yang dikaji. Evaluasi dampak ini dilakukan dengan analisis kuantitatif melalui dua cara yaitu tabulasi sederhana dan analisis hubungan hubungan kausal. Fokus utama hubungan kausal ini adalah untuk menelusuri apakah ada hubungan yang erat antara sumberdaya pembangunan (misalnya dana, material, tenaga) dengan output dari program (diukur dengan produktivitas, pendapatan, penyerapan tenaga kerja).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas : (1) evaluasi kebutuhan (perencanaan), (2) evaluasi operasional, dan (3) evaluasi dampak. Untuk evaluasi kebutuhan dilakukan terhadap sistem perencanaan, rancangan paket dan rancangan manajemen program. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan komparatif. Secara sederhana pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan antara 'rencana' dan 'realisasi'.

Sesuai dengan tujuannya, data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data dan informasi sekunder terutama mencakup perencanaan program, paket program dan penyebaran wilayah program. Sedangkan data dan informasi primer terutama mencakup implementasi program.

Basis lokasi penelitian mengacu pada jenis program utama yang ada, dengan mempertimbangkan eksistensi manfaat dan dampak program. Program Desa Mapan, P4MI dan FEATI merupakan program pemberdayaan masyarakat di wilayah miskin yang masing-masing merupakan program utama Badan Ketahanan Pangan, Badan Litbang Pertanian, dan Badan SDMP Kementerian Pertanian. Ketiga program tersebut dinilai representatif untuk mewakili program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.

Berdasarkan pertimbangan kinerja program di lapangan dan kondisi spasial wilayah yang memiliki keragaman kondisi infrastruktur, perkembangan ekonomi, dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang berbeda, maka ditetapkan lokasi pada tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (Tabel 2). Untuk Jawa Barat ditetapkan Kabupaten Majalengka dan Kuningan untuk program Desa Mapan dan Kabupaten Majalengka dan Cirebon untuk program FEATI. Di provinsi Jawa Tengah ditetapkan Kabupaten Blora dan Temanggung untuk program P4MI. Sementara untuk NTB ditetapkan Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat untuk program Desa Mapan dan FEATI, sedangkan untuk program P4MI hanya di Kabupaten Lombok Timur.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Program Demapan**

Program Demapan adalah program pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat dengan sasaran peningkatan kapasitas dan akses ekonomi penduduk miskin melalui pendekatan kelompok. Dalam operasionalnya, pengembangan KA dan pembangunan ekonomi pedesaan membutuhkan dukungan lintas sektoral terkait dengan pembinaan dan pendanaan yang mencakup pengembangan kelembagaan, aktivitas pemberdayaan, dukungan sarana-prasarana dengan sasaran pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Prinsip dasar dari program Demapan ini adalah pemberdayaan kelompok miskin dan penguatan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui revitalisasi dan transformasi struktural ekonomi pertanian dan pedesaan, sehingga tercipta kesempatan dan akses bagi semua pihak, khususnya penduduk miskin.

Keberhasilan, kemandirian, dan keberlanjutan program Demapan ini sedikitnya ditentukan oleh tiga syarat kecukupan yaitu: (i) kemampuan memperbaharui secara berkelanjutan kapasitas ekonomi pertanian dan pedesaan yang mencakup ketersediaan dan akses terhadap sumberdaya produktif, teknologi dan informasi terbaru, usaha ekonomi produktif, dan pengembangan pasar serta efisiensi pemasarannya; (ii) kreatifitas menumbuh-kembangkan diversifikasi usaha (pertanian dan non-pertanian) secara horizontal dan vertikal, serta penciptaan dan akses kesempatan kerja formal dan informal di tingkat desa dan diluar desa; dan (iii) eksistensi dan keberlanjutan Demapan sangat ditentukan oleh pengembangan infrastruktur publik dan kehadiran serta peran swasta dalam

mendukung kegiatan ekonomi dan sosial-kelembagaan dalam perspektif pemberdayaan dan penumbuhan ekonomi pedesaan.

Pengembangan Demapan difokuskan pada desa miskin (minimal 30% rumah-tangga pedesaan tergolong miskin), sehingga keberhasilannya sepantasnya menjadi komitmen semua pihak. Dalam konteks ini dibutuhkan sinergi dan integrasi program JPS terpadu berbasis rumah-tangga, sinerginya dengan program pemberdayaan, sinergi dan adaptasi program pembangunan pedesaan dengan program pemberdayaan. Pada prinsipnya dibutuhkan sinergi dan integrasi program lintas sektoral dalam menjamin keberhasilan Demapan (pemberdayaan KA dan penumbuhan ekonomi pedesaan) dengan sasaran pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Input dari proses program Demapan di Provinsi Jawa Barat direpresentasikan dari pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sarana dan prasarana. Dari tiga dimensi tersebut pengembangan (Kelompok Afinitas, Tim Pangan Desa dan Lembaga Keuangan Desa) di Provinsi Jawa Barat masuk kategori kelas tinggi. Hal ini direpresentasikan dari nilai score yang lebih dari 60. Hal yang sama juga pada dimensi pemberdayaan masyarakat dimana nilainya score lebih dari 45 baik dari tingkat kehidupan maupun dari pola pikir. Sementara itu dari pengembangan sarana dan prasarana provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori sedang dengan nilai score yang tidak sampai 30

Kinerja sistem ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat masuk kelas tinggi dengan score 100.8. Ketersediaan pangan di desa survai di Jawa Barat tidak mengalami masalah karena empat desa tersebut merupakan desa pertanian. Selain itu anggota kelompok afinitas sudah terbiasa menyimpan gabah untuk cadangan pangan keluarga. Untuk mendapatkan pangan apabila dibutuhkan juga tidak mengalami hambatan, karena lokasi desa mudah dijangkau selain itu desa dekat dengan pasar. Dari segi harga panganpun juga terjangkau, hanya sebagian anggota kelompok afinitas miskin di desa Cidenok yang merasa kesulitan membeli beras apabila pendapatan di sektor pertanian berkurang. Pola konsumsi pada umumnya sudah menuju pada konsumsi beragam, berimbang, bergizi dan aman (B3A). B3A tersebut bisa diperoleh dari memanfaatkan pekarangan, tetapi desa Pasir Melati belum mengoptimalkan lahan pekarangan tersebut.

Keberlanjutan program Demapan memerlukan dukungan komitmen daerah. Komitmen daerah Provinsi Jawa Barat untuk melanjutkan program ini masuk kelas rendah. Dimana hasilnya scorenya hanya 27.95 (kelas tinggi lebih scorenya dari 60). Komitmen daerah dalam melanjutkan program Demapan masih sebatas dalam keinginan saja. Hal ini direpresentasikan dari rendahnya keinginan mereplikasi model desa ke desa lain dan kalau ada keinginan mereplikasi hanya mau terlibat dalam pembinaan saja. Selain itu komitmen daerah untuk membangun dan meneruskan desa mandiri pangan tidak diikuti dengan penyediaan anggaran daerah (sharing dana).

Tingkat kemandirian di Provinsi Jawa Barat termasuk kelas tinggi khususnya untuk Desa Cimahi, Desa Cihanjaro dan Desa Cidenok (scorenya lebih dari 300). Sementara itu Desa Pasir Melati masuk dalam kategori kelas sedang

Secara Agregat input proses program Demapan di NTB yang direpresentasikan oleh tiga dimensi pertama (pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sarana dan prasarana) termasuk dalam kategori tinggi. Kecuali untuk dimensi pengembangan kelembagaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori sedang. Untuk ketiga dimensi tersebut Kabupaten Lombok Barat lebih baik dibandingkan Lombok Timur. Dalam rangka pencapaian sistem ketahanan pangan yang lebih baik dimasa yang akan datang maka dukungan pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur lebih ditingkatkan lagi

Pencapaian kinerja sistem ketahanan pangan pada dimensi ketiga di NTB termasuk kategori relatif tinggi dengan nilai 91,7 (>90) dari nilai maksimum 150. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pencapaian sistem ketahanan pangan di Lombok Timur dibandingkan dengan Lombok Barat (72.7 vs 110.77). Desa Kuripan di Lombok Barat dengan nilai score 120.9 merupakan desa yang memiliki keberhasilan yang tinggi dari sisi sistem ketahanan pangan di NTB. Keberhasilan ini menunjukkan bukti bahwa model Demapan mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan

Kemandirian dan keberlanjutan Demapan kedepan akan sangat ditentukan oleh komitmen pembinaan dan pendanaan daerah. Secara umum di NTB persepsi responden menyatakan bahwa komitmen daerah ini tergolong rendah, baik di Lombok Barat dan di Lombok Timur. Tanpa komitmen daerah keberlanjutan program Demapan kedepan akan dipertaruhkan. Pemerintah daerah seharusnya terpanggil untuk melanjutkan pengembangan Demapan khususnya dalam pembinaan dan

pengembangan jejaring proses produksi (produk olahan berbasis pangan dan produk UKM) yang telah dikembangkan relatif berhasil dilapangan

Tingkat Kemandirian Demapan di NTB termasuk kategori tinggi dengan nilai score 317.75 (dari nilai maksimal 300). Kinerja yang relatif baik ini khususnya disebabkan oleh kinerja Demapan yang relatif tinggi di Lombok Barat (348.30) dibandingkan di Kabupaten Lombok Timur. Kemandirian dan keberlanjutan Demapan ini akan ditentukan oleh dukungan pengembangan sarana dan prasarana serta komitmen pembinaan dan pendanaan daerah. Mengingat tingkat pencapaian Demapan belum maksimal, maka kinerja dimensi lainnya tetap perlu di tingkatkan.

Program Demapan merupakan representasi dari pembangunan pedesaan inklusif, dengan prinsip dasar penciptaan kesempatan dan akses bagi semua pihak, sehingga patut dijadikan model pengentasan kemiskinan dipedesaan. Pengentasan kemiskinan pedesaan agar fokus pada implementasi Demapan dilapangan, sehingga program lintas sektoral agar diarahkan pada desa Demapan. Program Demapan ini pada hakekatnya merupakan koreksi terhadap program parsial-sektoral-individual yang dinilai tidak efektif dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Dengan perluasan implementasi Demapan diharapkan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi program pembangunan dan akselerasi pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Meskipun tiga desa sudah masuk dalam kategori kelas tinggi, tetapi keberlanjutan program Demapan harus diteruskan dengan melakukan pembangunan lintas sektor yang terkoordinasi. Dukungan melanjutkan program Demapan juga dibarengi dengan komitmen daerah dalam merefleksikan desa serta penyediaan anggaran daerah dalam bentuk sharing dana

Kinerja kemandirian Demapan di NTB belum maksimal dengan nilai score 317.8 ( dari nilai score maksimum 500). Namun demikian terdapat sukses keberhasilan yang patut dibanggakan yaitu keberhasilan Demapan di Desa Kuripan di Lombok Barat dengan nilai score 384.50. Keberhasilan ini merefleksikan bahwa model pemberdayaan kelompok miskin berbasis partisipasi masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Keberhasilan desa Kuripan ini khususnya adanya kemampuan membangun jejaring kerja dengan LSM, swasta dan pemerintah daerah dalam pengembangan dan perluasan pemasaran produk yang dihasilkan kelompok afinitas. Desa dan daerah lainnya patut memetik pembelajaran dari keberhasilan desa Kuripan ini.

## **Program P4MI**

Keberhasilan dan pelajaran yang diperoleh dari kegiatan P4MI dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan model pengembangan ekonomi perdesaan. Pembangunan ekonomi perdesaan perlu didasarkan pada kebutuhan investasi fisik prasaranan desa, pemberdayaan sumberdaya manusia, dan penerapan inovasi pertanian. Melalui pendekatan partisipatif dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan, dan mengelola pembangunan investasi desa, telah menumbuhkan semangat kerja, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilaksanakannya.

Pembangunan irigasi sederhana merupakan kunci keberhasilan pembangunan pertanian di Blora. Tersedianya air sepanjang tahun mengakibatkan perubahan usahatani yang diawali oleh perubahan pola tanam, intensitas tanam, produksi dan pendapatan usahatani. Keberhasilan Investasi irigasi mengungkit perkembangan agribisnis baik di sektor hulu maupun sektor hilir sebagai respon permintaan pasar yang berkembang di pedesaan.

Investasi irigasi memberikan hasil nyata terhadap peningkatan pendapatan bahkan peningkatan perekonomian desa. Peluang peningkatan produksi tanaman pangan di desa contoh cukup tinggi, mengingat beberapa desa belum mengoptimalkan lahan dan sarana pengairan untuk kegiatan usahatani. Hal ini terutama pada desa-desa yang baru melakukan investasi pada tahun 2007 dan tahun 2008.

Pemberdayaan masih diperlukan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan untuk keberlanjutan dan pengembangan kegiatan. Kelembagaan kelompok tani, kelompok pemakai air, sistem perguliran masih sangat lemah dalam hal pengaturan hak dan kewajiban, penerapan sanksi dan pengawasan.

Pembangunan jalan desa dan irigasi sederhana membawa perubahan dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan pertanian di Temanggung. Pembangunan jalan desa telah meningkatkan aksesibilitas petani ke lahan dan pasar, menurunkan biaya pengangkutan hasil pertanian dan sarana

produksi pertanian. Investasi irigasi telah meningkatkan pendapatan usahatani tanaman semusim. Luas areal untuk tanaman padi meningkat terutama pada MT I dan MTII.

Di Lombok Timur, kontribusi petani dalam membangun investasi desa cukup tinggi. Kontribusi masyarakat terdiri dari tenaga, tanah, dana dan bahan bangunan yang nilainya berkisar 30% sampai 71% dari biaya investasi. Pembangkitan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hasil investasi tidak terlepas dari kerja KID yang ditunjang oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat terutama tokoh agama di masing-masing desa.

Pembangunan jalan desa dan irigasi sederhana, telah membawa perubahan peningkatan pendapatan usahatani. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh perluasan tanaman melalui peningkatan intensitas tanam dan peningkatan produktivitas padi, jagung dan hortikultura. Investasi jalan mengungkit perkembangan usaha transportasi di pedesaan. Usaha jasa transportasi yang berkembang adalah ojek motor dan jasa mobil angkutan barang.

## **Program FEATI**

Secara konsepsi terdapat beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan dalam program FEATI ini yaitu (i) Belum terdapat pedoman yang jelas tentang mekanisme keterkaitan antar lembaga penyelenggara, yaitu antara BPSDMP, BBP2TP dan Pusdatin, yang berimbas pada lemahnya koordinasi di tingkat daerah (BPTP, Bakorluh, Bapeluh). Sesuai dengan amanat UU no.16/2006, koordinasi penyelenggaraan penyuluhan seharusnya menjadi tanggung jawab Bakorluh. Namun lembaga Bakorluh yang umumnya masih baru terbentuk untuk memenuhi prasyarat sebagai lokasi FEATI belum banyak berperan baik dalam pelaksanaan kegiatan FEATI maupun penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara umum, karena terbentur pada berbagai kendala ; (ii) Saat diimplementasikan, konsepsi FEATI ini terlihat belum “matang” yang ditandai dengan terjadinya perubahan pedum dari tahun ke tahun. Perubahan mendasar mencakup perubahan orientasi kegiatan dari sekedar pembelajaran menjadi sekaligus pembelajaran berwawasan bisnis disertai dengan penerapan “one village one product”: (iii) Aparat penyelenggara memiliki pemahaman yang masih beragam tentang konsepsi program. Kondisi ini disebabkan oleh seringnya terjadi pergantian aparat baik di pusat maupun daerah.

Kinerja FMA sangat beragam. Penentu utama adalah kapasitas dan kapabilitas pengurus dan anggota FMA, proses pendampingan oleh aparat terkait (TPL, dinas). Selain itu, faktor perubahan pada pedum, seperti terjadinya perubahan orientasi dalam proses pembelajaran, juga berpengaruh terhadap kinerja FMA.

Metode FMA yang partisipatif, demokratis, transparan, akuntabilitas dan sensitive gender memunculkan sifat kewirausahaan dan kebersamaan petani serta membuka peluang usaha dan aksesibilitas yang lebih luas untuk informasi, teknologi dan pemasaran. Pada kelompok tertentu masih ada dominansi PPL atau petugas dalam penyusunan proposal dan penentuan kegiatan.

Program e-petani yang ditangani oleh Pusdatin dinilai masih sangat kurang baik sarana fisiknya maupun jumlah peserta yang dapat dijangkau. Metode dan waktu pembelajaran juga diharapkan lebih baik dan lebih banyak lagi.

Introduksi program FEATI dengan melalui kegiatan yang dikelola FMA mampu memberikan manfaat bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Secara umum peserta menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan peserta meningkat terutama dalam hal : kemampuan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki; memilih dan mengelola usaha yang sesuai dengan potensi diri dan sumberdaya yang ada di sekitarnya. Keikutsertaan dalam program ini juga dapat meningkatkan akses terhadap sumber informasi dan teknologi sesuai dengan kebutuhannya.

Program FEATI sudah mulai mampu menumbuhkan pengusaha baru di bidang agribisnis di pedesaan. Bahkan mulai muncul petani “ahli” dengan spesialisasi tertentu, dan sudah bisa menjadi narasumber bagi petani lain yang membutuhkan ilmu dan kealiannya.

Usaha yang dilakukan FMA/anggota FMA sebagian sudah mulai mendatangkan keuntungan dengan besaran yang bervariasi. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peserta sudah mulai terjadi pada beberapa peserta.

Implementasi program FEATI di tingkat lapangan seringkali terkendala dengan berbagai perubahan peraturan yang ditetapkan pelaksana, termasuk perubahan pedum di dalamnya. Program yang akan diimplementasikan hendaknya sudah matang dan baku secara konsep sehingga perubahan-

perubahan peraturan dapat diminimalisir. Perubahan hanya dilakukan jika memang sangat penting untuk merespon kondisi tak terduga yang muncul kemudian.

Pergantian personel pelaksana jika memungkinkan dihindari. Jika pergantian personel pelaksana program tidak dapat dihindari, hendaknya proses transfer pemahaman terhadap konsepsi program tidak terkendala, sehingga implementasi program dapat tetap berlangsung dengan baik sesuai dengan konsep yang sudah dibangun.

Program FEATI memang memiliki keunggulan dalam menciptakan komunitas pembelajar, namun hal ini tampaknya akan lebih baik jika pada tahapan selanjutnya juga dilengkapi dengan penyediaan modal usaha, atau setidaknya memfasilitasi akses “petani pengusaha baru” ini terhadap sumber permodalan. Beberapa program seperti PUAP, UEB, KUT mungkin memang menyediakan bantuan modal. Namun seringkali terjadi kesulitan dalam mensinergikan program yang ada karena masing-masing program memiliki sasaran, aturan main, dan indikator keberhasilan yang berbeda.

Sinergi dan integrasi program di tingkat masyarakat sangat ditentukan oleh kesiapan masyarakat itu sendiri. Kesiapan itu, berupa keberadaan lembaga yang menjadi wadah bagi petani sasaran. Kelompok tani dan gapoktan yang dinamis, dipastikan akan membuat syarat keberhasilan program lebih mudah untuk tercapai. Selain itu, kendala-kendala yang ada terkait dengan ketentuan yang ada pada masing-masing program bisa diatasi dengan baik seperti pada kasus di Desa Sunia Baru.